

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PERUSAHAAN TERHADAP
KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)**

Andrian Budi Prasetyo
Universitas Diponegoro
andrian_bp@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of audit committee and firm characteristics against the possibility of fraudulent financial reporting. Audit committee characteristics examined by an independent audit committee, audit committee financial expertise, audit committee meetings and tenure of the audit committee. Then, firm characteristics examined its effect on financial reporting fraud is managerial ownership, corporate leverage, firm size and growth rate of the company. The research was conducted by quantitative methods using secondary data. Secondary data comes from a list of cases Bapepam-LK and the company's annual report listed on the Indonesian Stock Exchange. This research population is company listed on the Indonesian Stock Exchange, and then the samples were taken by purposive sampling with criteria non-financial company and have the required data in this study. At last, total sample are 40 companies, that comprised into 20 companies with commit fraud financial reporting and 20 companies with did not commit fraud in financial reporting with the same industry and size of company assets. This study uses logistic regression statistical tools because the dependent variable was dummy variable (non metric), while the independent variable was metric and non metric variable. The results showed that the characteristics of audit committees (audit committee financial expertise and tenure of the audit committee) have a negative impact on financial reporting fraud, while the firm characteristics (managerial ownership and firm size) has a positive influence on financial reporting fraud. Furthermore, the other firm characteristics (growth companies) negatively affect the financial reporting fraud.

Keywords: audit committee, firm characteristics, fraud, fraudulent financial reporting

PENDAHULUAN

Menurut Holmes *et al.* (dalam Nurharyanto, 2011) tindak kecurangan (*fraud*) adalah suatu salah saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, dengan maksud menipu terhadap pihak lain dan mengakibatkan pihak lain tersebut dirugikan. Tindak kecurangan atas laporan keuangan mencakup perbuatan

kesalahan yang disengaja atas nilai keuangan tertentu untuk menghasilkan suatu tampilan keuntungan yang lebih baik guna mengelabui atau mengecoh pemegang saham maupun kreditor (Nurharyanto, 2011).

Keberadaan Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk

memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI,2012). Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan (IKAI,2012).

Untuk itu dalam melakukan tugas dan fungsinya seperti diatas, komite audit memiliki karakteristik-karakteristik yang akan menunjukkan bahwa tugas komite audit tersebut telah berjalan efektif atau belum. Karakteristik-karakteristik komite audit itu antara lain ditunjukkan oleh komite audit independen, selain itu keahlian dalam bidang keuangan, jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun serta masa jabatan dari para anggotanya yang didasarkan pada berapa lama telah menjadi komite audit.

Pada akhirnya ketika karakteristik-karakteristik komite audit sudah terpenuhi, maka tugas dan fungsi komite audit diharapkan akan berjalan secara efektif, dimana salah satu tugas komite audit adalah pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan secara otomatis juga akan mengawasi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerjasama (*nexus of contract*) yang mana satu atau lebih prinsipal menggunakan orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Di dalam teori keagenan, prinsipal adalah pemegang saham/pemilik/investor, sedangkan agen adalah manajer atau manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agen berkewajiban mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik atau laba perusahaan. Sebagai imbalannya, agen akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Konflik keagenan terjadi karena kepentingan prinsipal untuk memperoleh laba yang terus bertambah, sedangkan agen tertarik untuk menerima kepuasan yang terus bertambah berupa kompensasi keuangan. Perbedaan kepentingan

ini mengakibatkan timbulnya persoalan di dalam perusahaan seperti biaya keagenan, kebijakan struktur modal, dan perilaku manajer menjadi individualistik, oportunistik, dan *self-interest*. Alternatif untuk mengurangi persoalan yang ditimbulkan konflik keagenan yaitu adanya penyertaan kepemilikan saham untuk manajemen, meningkatkan *dividend payout ratio*, pendanaan dari utang, dan penyertaan investor institusi sebagai pemilik saham. Variabel-variabel yang berhubungan dengan proses kontrak sendiri merupakan karakteristik dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan istilah karakteristik perusahaan yang bermakna sama dengan istilah proses kontrak, sehingga karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, salah satunya adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan (Jensen dan Meckling, 1976).

Di Indonesia sendiri komite audit bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa juga telah diatur dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit". Sama halnya dengan SOX 2002, Peraturan No. IX.I.5 ini mewajibkan perusahaan-perusahaan terdaftar untuk membentuk komite audit yang seluruhnya

independen dengan salah satu anggota komite audit memiliki keahlian keuangan.

Penelitian ini dimotivasi oleh peningkatan perhatian pada pentingnya keahlian keuangan dan komite audit yang seluruhnya independen dalam rangka untuk menjamin pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Pada tahun 1999, *Blue Ribbon Committee* (BRC) merekomendasikan bahwa perusahaan publik memiliki komite audit yang seluruhnya independen dan sedikitnya satu anggota memiliki keahlian keuangan. Di tahun yang sama, rekomendasi tersebut didukung oleh *New York Stock Exchange* dan *National Association of Securities Dealers*. Peran komite audit dalam tata kelola perusahaan merupakan topik meningkatnya kepentingan pengaturan. Dalam sebuah usaha untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah skandal pelaporan keuangan terbaru, Undang-Undang Sarbanes Oxley 2002 mengamanatkan bahwa komite audit menjadi independen secara penuh dan memiliki sedikitnya satu ahli keuangan. Disamping itu, Undang-Undang Sarbanes Oxley 2002 menjadikan komite audit bertanggung jawab secara langsung untuk menunjuk, memberikan kompensasi dan mengawasi auditor eksternal. SEC mengadopsi aturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sarbanes Oxley ini.

Literatur akuntansi sampai saat ini memiliki fokus utama pada hubungan karakteristik komite audit (komite audit

independen dan keahlian) dengan dampak pelaporan keuangan, hubungan dengan auditor eksternal dan biaya auditor. Sementara itu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa independensi dan keahlian komite audit meningkatkan proses pelaporan keuangan (Abbott *et al.* 2004; Bedard *et al.* 2004; Beasley 1996; Beasley *et al.* 2000), penelitian tersebut tidak membahas faktor-faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat yang mendasari perusahaan dan proses kontrak yang dapat mengurangi pengaruh dari komite audit independen dalam pelaporan keuangan yang baik. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya tidak membahas eksistensi dari pelaporan keuangan yang baik dalam perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komite audit independen secara 100% sebelum SOX 2002. Selain itu, banyak perusahaan yang memiliki komite audit yang seluruhnya independen dengan anggotanya yang memiliki keahlian keuangan; namun, manajemen terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan (Bausch dan Lomb, 1994). Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan tertentu dikompromikan oleh faktor-faktor lainnya.

Beasley *et al.* (1999) menemukan bahwa hanya 38% perusahaan yang mengalami *fraud* memiliki komite audit yang seluruhnya dari luar, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang independen maka akan semakin menurunkan kemungkinan kecurangan

pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian Collier (1993) menjelaskan hasil survei yang mengindikasikan bahwa independensi komite audit merupakan faktor terpenting kedua.

Penelitian oleh Raghundan *et al.* (2001) dalam Huang dan Thiruvandi (2010) menemukan bahwa komite audit yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan kecurangan. Penelitian tentang pengaruh jumlah rapat terhadap kecurangan diteliti oleh Abbott *et al.* (2000) yang menemukan bahwa komite audit yang melakukan rapat minimal dua kali akan menurunkan kemungkinan kecurangan dan salah saji nonkecurangan. Selanjutnya, Beasley (1996) dalam penelitiannya mengenai pengaruh antara masa jabatan anggota komite audit terhadap kecurangan pelaporan keuangan menemukan bahwa masa jabatan komite audit yang lebih pendek akan berjalan tidak efektif dalam mencegah kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan juga beberapa telah dilakukan. Penelitian oleh Deli dan Gillan (2000) menemukan bahwa kepemilikan manajerial menyelaraskan insentif pemegang saham dengan manajemen, sehingga dengan jumlah saham yang dimiliki oleh direksi meningkat maka akan menurunkan kemungkinan kecurangan

pelaporan keuangan. Penelitian tentang pengaruh *leverage* perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan oleh Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa semakin meningkat rasio *leverage* perusahaan maka akan semakin meningkat juga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Pada akhirnya, penelitian oleh Watts dan Zimmerman (1986) menemukan bahwa perusahaan berukuran besar dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berusaha untuk memanipulasi labanya pada periode saat ini.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti pengaruh karakteristik komite audit dan perusahaan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Deli dan Gillan (2000) menunjukkan bahwa komposisi komite audit berkembang sebagai fungsi dari sifat yang mendasari sebuah perusahaan dan lingkungan kontraknya. Penelitian sebelumnya pada peran komposisi komite audit dan aktivitas dalam proses kontrak terbatas pada hasil yang beragam (Menon dan Williams 1994; Deli dan Gillan 2000). Selain itu, penelitian sebelumnya tidak membahas pengaruh komposisi komite audit dan karakteristik perusahaan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia karena dalam penelitian ini menggunakan daftar kasus yang dikeluarkan oleh Bapepam LK dimana merupakan instansi

pemerintah yang mengawasi perusahaan *listed* di BEI. Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan. Perusahaan keuangan tidak dimasukkan sebagai sampel dapat dibenarkan karena lingkungan regulasi, seperti komite audit juga dapat dianggap sebagai monitor pihak ketiga (Fama dan Jensen, 1983b). Peneliti disini memperluas literatur dengan meneliti pengaruh karakteristik komite audit dan perusahaan pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk

mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Positive Accounting Theory

Menurut Scott bahwa teori akuntansi positif mencoba membuat prediksi yang bagus kejadian dalam dunia nyata dan menerjemahkannya dalam transaksi akuntansi (dalam Januarti, 2004). Sementara teori normatif cenderung untuk merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan, sedangkan teori akuntansi positif mencoba menjelaskan dan memprediksi tentang tindakan perusahaan terhadap kebijakan akuntansi yang akan dipilih serta reaksi perusahaan terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (dalam Januarti, 2004). Dalam teori akuntansi positif ini juga menggambarkan perilaku oportunistik dari para manajer untuk selalu menguntungkan diri mereka sendiri, sehingga dalam teori akuntansi positif Watt dan Zimmerman (1986) merumuskan tiga hipotesis, yaitu :

(a). Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plans Hypothesis*)

Dalam *ceteris paribus*, manajer perusahaan dengan program bonus lebih

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan periode mendatang ke periode sekarang, sehingga mereka bisa meningkatkan bonusnya untuk tahun sekarang. Berdasarkan hipotesis diatas apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung dengan bonus akan cenderung memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode *accrual* (Januarti,2004).

(b). Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Dalam *ceteris paribus*, manajer perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang besar akan lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan periode mendatang ke periode sekarang akan menyebabkan rasio *leverage* perusahaan akan menjadi kecil, sehingga menurunkan kemungkinan terkena kegagalan teknis (*default technic*), seperti diketahui bahwa banyak perjanjian utang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio utang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham dan lain-lain selama perjanjian. Jika perjanjian tersebut dilanggar maka perusahaan akan terkena penalti, seperti kendala dalam deviden atau pinjaman tambahan (Januarti, 2004)

(c). Hipotesis Biaya Politik (*Polytical Cost Hypothesis*)

Dalam *ceteris paribus*, semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukhan laba yang dilaporkan saat ini untuk periode mendatang. Dasar hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menerapkan aturan hukum dan regulasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian individu yang rasional cenderung untuk tidak mengetahui informasi yang lengkap. Proses politik tidak beda jauh dengan proses pasar, atas dasar *cost information* dan *cost monitoring* tersebut, manajer memiliki insentif untuk memiliki laba akuntansi tertentu dalam proses politik (Watts dan Zimmerman, 1990).

Hipotesis diatas juga mengasumsikan bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya lebih kecil dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan

kecil. Profitabilitas yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu politik dan dapat menyebabkan regulasi atau pajak baru khususnya untuk perusahaan besar yang mungkin dijalankan dengan standar pelaporan yang lebih tinggi (Januarti, 2004).

Theory of Planned Behavior

Teori perilaku yang direncanakan diusulkan oleh Icek Ajzen pada 1985. Teori ini dikembangkan dari Teori Aksi Beralasan, yang diusulkan oleh Martin Fishbein bersama-sama dengan Icek Ajzen di 1975 yang didasarkan pada berbagai teori-teori sikap seperti Teori Pembelajaran, Teori Harapan-Nilai, Teori Konsistensi, dan *Attribution Theory*. Menurut *theory of planned behavior* (teori perilaku yang direncanakan) yang dikemukakan oleh Izek Ajzen, dinyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditampilkan karena alasan tertentu, yaitu bahwa orang tersebut berpikir tentang konsekuensi tindakannya dan mengambil keputusan secara hati-hati untuk mencapai hasil tertentu dan menghindari hal-hal yang lainnya.

Berdasarkan teori tersebut, niat (intensi) merupakan komponen yang paling penting dalam membentuk perilaku, dan lebih penting daripada sikap. Niat sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari gabungan tiga komponen, yaitu sikap terhadap tingkah laku tertentu (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan

keyakinan mampu mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*). Sesuai dengan teori tersebut, hal ini dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya perilaku yang direncanakan. Meski demikian teori ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku lain yang bersifat spontan. Berdasarkan gambaran tentang keterkaitan antara perilaku dengan beberapa komponennya seperti dikemukakan di atas, maka menjadi lebih jelas alasan sikap dan perilaku seseorang tidak selalu dapat seiring. Sikap seseorang terhadap perilaku tertentu, merupakan konsekuensi yang dihasilkan dari dua faktor, yaitu keyakinan mengenai konsekuensi perilaku tertentu dan penilaian terhadap akibat yang mungkin timbul (Ajzen, 1985).

Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Teori agensi menurut Fama dan Jensen (1983b) bahwa pendelegasian tanggung jawab pemegang saham untuk pengendalian internal oleh dewan komisaris membuat dewan tertinggi pengendalian internal dalam perusahaan, dan komposisi individu yang bertugas dalam dewan komisaris adalah faktor penting dalam menciptakan dewan yang merupakan pengawas efektif tindakan manajemen. Oleh dewan komisaris, pengendalian internal ini kemudian didelegasikan kepada komite audit. Mekanisme pengendalian internal kemudian ditingkatkan dengan dimasukkannya

anggota komite audit dari luar (komite audit independen) karena komite audit independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, sehingga sangat independen dalam bekerja sebagai pengawas dan membantu mengurangi konflik agensi antara pemegang saham dengan manajemen tingkat atas.

Collier (1993) menjelaskan hasil survei tahun 1991 tentang komite audit di Inggris, yang terdiri dari 250 perusahaan top dari *The Times* dan 50 institusi keuangan utama. Responden dari survei mengindikasikan bahwa independensi komite audit terhadap manajemen merupakan faktor terpenting kedua, setelah *judgment*, mempengaruhi keefektifan komite. Beasley, Carcello dan Hermanson (1999) mengklasifikasikan komisaris dalam tiga kategori : (1) *inside commissioner*; (2) *gray commissioner* dan (3) *outside commissioner*. *Inside commissioner* adalah pegawai atau pejabat perusahaan sekarang, anak perusahaannya atau perusahaan yang berafiliasi. *Gray commissioner* adalah mantan pegawai atau pejabat perusahaan, anak perusahaannya atau perusahaan yang berafiliasi. *Gray commissioner* juga *inside commissioner* yang memiliki hubungan spesial dengan manajemen, seperti sanak keluarga, pemasok atau konsumen signifikan perusahaan, konsultan atau pengacara perusahaan dan *interlocking director*. Beasley *et al.* (1999) menemukan bahwa hanya 38% perusahaan yang mengalami *fraud* memiliki komite audit yang seluruhnya *outside commissioner*.

Outside commissioner adalah anggota yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan selain kemungkinan kepemilikan saham. *The Blue Ribbon Committee* (1999) mengeluarkan rekomendasi tertentu untuk meningkatkan komite audit. Salah satu rekomendasi adalah definisi yang lebih ketat tentang independensi yang akan diterapkan untuk semua anggota komite audit. Anggota komite independen adalah yang tidak memiliki hubungan saat ini atau sebelumnya atau hubungan dengan perusahaan, anak perusahaan, afiliasinya, atau manajemen. Jika tidak, anggota dianggap tidak independen jika : (1) pegawai atau pensiunan perusahaan, (2) kerabat manajemen, (3) konsumen signifikan, (4) pemasok dan (5) *interlocking director*. Untuk itu penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Dalam teori agensi menunjukkan bahwa kinerja manajer (agen) diawasi oleh dewan komisaris (prinsipal) dimana mewakili pemilik perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena pemilik ingin mengawasi agar kepentingan para pemilik tercapai. Untuk pengawasan tentang pelaporan keuangan, dewan komisaris mendelegasikannya kepada komite audit untuk mengawasi

proses pelaporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai kepentingan manajer sendiri. Oleh karena itu, diharapkan komite audit memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi agar komite audit melakukan proses pengawasan pelaporan keuangan dengan efektif.

Raghunandan *et al.* (2001) dalam Huang dan Thiruvadi (2010), menemukan bahwa komite audit terdiri dari setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi lebih cenderung untuk (1) mengadakan pertemuan lebih lama dengan kepala auditor internal, (2) menyediakan akses pribadi untuk kepala auditor internal; dan (3) memeriksa proposal audit internal dan hasil-hasil audit internal. Davidson *et al.* (2004) menunjukkan signifikan positif reaksi harga saham ketika anggota baru komite audit memiliki keahlian keuangan. ArArchambeault *et al* (2008) (dalam Qin dan Liwen tahun 2007), menemukan bahwa ada hubungan positif antara prediksi jangka pendek insentif kompensasi (hibah opsi saham jangka pendek) untuk anggota komite audit dan kemungkinan penyajian kembali. Diasumsikan bahwa kehadiran keahlian keuangan komite audit dapat membantu perusahaan dari pencegahan kecurangan. Untuk itu hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap

kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Teori agensi menunjukkan bahwa komite audit atas nama dewan komisaris yang mewakili pemilik dalam melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Tujuan pengawasan ini adalah agar manajer tidak melakukan perilaku oportunistik yang akan merugikan pemilik perusahaan. Perilaku oportunistik manajer salah satunya dilakukan dengan memanipulasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit yang selalu melakukan rapat akan terus memantau dan mengawasi proses pelaporan tersebut karena dengan rapat yang akan semakin banyak, tidak akan memberi peluang kepada manajer untuk memanipulasi pelaporan keuangan karena akan terus diperiksa komite audit.

Dalam analisis deskriptifnya tentang perusahaan yang mengalami kecurangan keuangan, Beasley *et al.* (1999) menemukan bahwa komite audit perusahaan tersebut umumnya bertemu setahun sekali. Mereka juga menemukan bahwa 25% perusahaan yang mengalami kecurangan tidak memiliki komite audit. Abbott *et al.* (2000) meneliti dua karakteristik komite audit, aktivitas dan independensi, dalam kombinasi, dan kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Mereka menemukan bahwa kehadiran komite audit yang bertemu setidaknya dua kali setahun dan tidak termasuk orang dalam akan berhubungan dengan penurunan kemungkinan kecurangan dan salah saji nonkecurangan. Menurut SEC (2002) (dalam Huang dan Thiruvadi tahun 2010), untuk mengatasi risiko, anggota komite audit harus mengkomunikasikan masalah akuntansi dengan manajer dan auditor internal serta eksternal tepat waktu. Periode setelah SOX, pengendalian dan kerajinan agenda (rapat) telah menjadi faktor kunci dari kualitas komite audit. Mustafa dan Meier (2006) (dalam Huang dan Thiruvadi tahun 2010), menunjukkan bahwa prosentase anggota independen dalam komite audit dan rata-rata masa jabatan anggota komite audit secara signifikan dan secara negatif berhubungan dengan kejadian penyalahgunaan aset dalam perusahaan publik baik acak maupun model dicocokkan sedangkan jumlah rapat komite audit tidak signifikan. Hipotesis penelitian ketiga adalah sebagai berikut :

H3 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Dalam teori agensi menunjukkan bahwa adanya konflik antara prinsipal

(pemilik) dengan agen (manajer). Pemilik perlu mengawasi kinerja manajer agar kepentingan pemilik tercapai. Komite audit atas nama dewan komisaris yang mewakili pemilik memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi proses pelaporan keuangan agar tidak ada perilaku manajer yang akan merugikan pemilik melalui manipulasi pelaporan keuangan perusahaan. Untuk itu masa jabatan komite audit yang melakukan pengawasan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut karena dengan masa jabatan komite audit yang lebih lama, maka komite audit akan lebih memahami seluk beluk perusahaan serta mengenal karakteristik para manajer yang diawasi oleh komite audit sehingga komite audit yang masa jabatannya lebih lama tidak akan mudah dikelabui oleh manajer.

Rekomendasi *Blue Ribbon Committee* (1999) dan SOX 2002, untuk menghormati literatur sebelumnya pada struktur dewan seperti Beasley (1996) menemukan bahwa rata-rata masa jabatan direksi dari luar secara signifikan lebih kecil pada perusahaan curang dibandingkan dalam perusahaan yang tidak curang. Anggota dengan masa jabatan lebih pendek mungkin terlalu dipengaruhi oleh para manajer yang baru saja dicalonkan mereka, dan dengan demikian mungkin kurang independen. Selain itu, anggota dengan masa jabatan lebih pendek memiliki pengalaman yang kurang dengan perusahaan, dan demikian mungkin kurang efektif. Oleh karena itu akan

dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Teori agen-prinsipal menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen dengan pemegang saham. Jika manajer-manajer memiliki sendiri saham dan melihat bahwa pekerjaan di perusahaan sebagai situasi jangka panjang, maka mereka mungkin akan lebih membuat keputusan terbaik bagi seluruh pemilik perusahaan, termasuk dirinya sendiri. Padahal sebelum ada kepemilikan manajerial, kepentingan manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) ini berbeda atau dengan kata lain tidak sejalan/selaras. Manajer memiliki kepentingan untuk dapat mensejahterakan diri mereka sendiri dengan gaji dan bonus yang besar, sedangkan pemilik memiliki kepentingan untuk mendapatkan deviden yang besar dimana besarnya deviden berbanding lurus dengan besarnya laba dan berbanding terbalik dengan biaya yang dikeluarkan salah satunya gaji manajer. Manajer menggunakan keunggulan mereka dalam hal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Konsisten dengan penemuan Deli dan Gillan (2000), sejauh mana bahwa kepemilikan manajerial menyelaraskan insentif manajemen dengan pemegang saham, sehingga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan akan berhubungan negatif dengan kepemilikan manajerial. Oleh karena itu, ketika manajer memiliki saham perusahaan maka manajer juga akan menjadi pemilik perusahaan. Kepentingan antara pemilik dan manajer yang sebelumnya tidak selaras, akan menjadi selaras dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer tersebut dan juga kecurangan yang dilakukan oleh manajer yang digunakan untuk mensejahterakan dirinya sendiri juga akan berkurang, dimana salah satu kecurangan yang dilakukan adalah kecurangan pelaporan keuangan. Untuk itu hipotesis kelima adalah sebagai berikut :

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh *Leverage* Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Watts dan Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positif menyebutkan bahwa ketika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang besar, maka direksi akan memilih metode akuntansi yang akan mengecilkan rasio *leverage* perusahaan dengan cara menggeser laba periode mendatang ke periode saat ini. Hal tersebut dilakukan direksi dengan tujuan untuk

mengantisipasi terjadinya *default technic*. Padahal sebagaimana diketahui bahwa kreditur selalu mensyaratkan untuk mempertahankan atau mematuhi tingkat rasio *leverage*. Oleh karena itu, untuk menghindari kreditur tidak memberikan pinjaman lagi atau perusahaan (debitur) dibatasi dalam memberikan deviden terhadap pemegang saham, maka direksi memilih metode akuntansi yang akan memperkecil rasio *leverage* perusahaan.

Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa pemilik, bertindak dalam kepentingan ekonomi dirinya sendiri, memiliki insentif untuk memindahkan kekayaan dari penggugat tetap menuju diri mereka sendiri. Semakin besar tingkat utang dalam struktur modal perusahaan, semakin besar permintaan untuk mengawasi, memberikan konflik kepentingan dalam lingkungan kontrak, konflik kepentingan ini terjadi antara kreditur (prinsipal) dan perusahaan sebagai debitur (agen). Kreditur memiliki kepentingan agar pokok dan bunga utang mereka untuk dilunasi oleh perusahaan, sedangkan perusahaan (debitur) memiliki kepentingan untuk mendapatkan pinjaman lagi dari debitur dan memberikan deviden kepada pemegang saham mereka. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan pada hipotesis enam sebagai berikut :

H6 : *Leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Dalam teori akuntansi positif oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan diproksikan untuk besarnya biaya politik sebuah perusahaan. Perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya lebih kecil dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil. Profitabilitas yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu politik dan dapat menyebabkan regulasi atau pajak baru.

Penelitian Fama dan Jensen (1983a,b) menunjukkan bahwa biaya agensi cenderung untuk meningkat dengan ukuran perusahaan. Peningkatan biaya agensi menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk mengawasi dan mekanisme pengendalian lainnya. Ketika peningkatan pengawasan dan pengendalian ini juga akan meningkatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen, dalam hal ini konflik antara perusahaan (agen) dan pemerintah (prinsipal).

Perusahaan besar dalam hal ini berusaha untuk mengecilkan labanya agar tidak ada regulasi atau pajak baru yang akan ditetapkan bagi mereka. Mengecilkan laba ini dilakukan dengan cara menanggukhan

laba periode sekarang ke periode mendatang. Mengecilkan laba tersebut bisa juga dilakukan dengan kecurangan laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga dilihat dari kompleksitas transaksi dalam perusahaan. Ketika dalam perusahaan transaksinya semakin kompleks, maka kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan juga akan semakin meningkat, sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan teori akuntansi positif menyatakan bahwa program bonus digunakan oleh direksi perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Direksi akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan bonus mereka dengan menggeser laba periode mendatang ke periode sekarang, sehingga laba periode sekarang akan lebih besar dibandingkan laba sebenarnya.

Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat bahwa kontrak menjadi efektif ketika tidak ada kendala pada bagaimana jumlah yang digunakan dalam kontrak dikalkulasi. Dalam kasus rencana kompensasi berdasarkan laba mereka berpendapat bahwa “Jika rencana kompensasi berdasarkan laba digunakan untuk memberikan penghargaan

kepada manajer untuk alasan insentif, harus ada pembatasan metode yang digunakan manajer dalam menghitung laba. Untuk itu akan dihipotesiskan sebagai berikut :

H8 : Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Tahun yang digunakan adalah tahun 2006-2010 karena pada tahun sebelum tahun 2006 data yang ada belum terdokumentasikan dengan baik, selain itu juga untuk keterbaruan data yang digunakan. Selanjutnya, data yang digunakan hanya sampai pada tahun 2010 karena data yang tersedia di Bapepam LK sampai tahun 2010, sedangkan data tahun 2010 keatas belum terdokumentasikan oleh Bapepam LK.

Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010.
2. Perusahaan memiliki data yang diperlukan untuk penelitian, dimana data tersebut terdapat dalam laporan tahunan.

Selanjutnya sampel diambil secara berpasangan antara perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dengan ketentuan memiliki kesamaan dalam bidang industri dan besar asetnya.

Variabel Penelitian dan Definisi

Operasional Variabel

Tabel 1
Pengukuran Variabel

	Nama Variabel	Pengukuran
1	Kecurangan pelaporan keuangan	Memberi nilai "1" jika ada kejadian kecurangan dalam hal ini termasuk dalam laporan kasus yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dan nilai "0" jika tidak ada kejadian kecurangan.
2	Komite audit independen	Persentase jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit.
3	Keahlian keuangan	Persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit.

Nama Variabel	Pengukuran
4 Rapat komite	Persentase dengan jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit selama tahun pelaporan terhadap minimal rapat/pertemuan yang disarankan oleh Komite Nasional <i>Good Corporate Governance</i> .
5 Masa jabatan	Persentase anggota komite audit yang menjabat dua periode berturut-turut.
6 Kepemilikan manajerial	Menjumlah persentase kepemilikan saham dari direksi dan komisaris.
7 <i>Leverage</i>	Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas pemegang saham (<i>stockholder</i>).
8 Ukuran perusahaan	Nilai buku total aset perusahaan dilogaritma natural.
9 Tingkat pertumbuhan	Menghitung perubahan atau selisih antara penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya terhadap penjualan tahun sebelumnya $((St-St_{-1})/ St_{-1})$.
10 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)	Memberi nilai "1" jika termasuk KAP 4 besar dan memberi nilai "0" jika tidak termasuk KAP 4 besar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	<i>Fraud</i>			N	Mean	<i>Non Fraud</i>		
			<i>Standard Deviation</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>			<i>Standard Deviation</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
INDP	20	0,97	0,09	0,67	1,00	20	1,00	0,00	1,00	1,00
FINEXP	20	0,74	0,22	0,33	1,00	20	0,84	0,23	0,33	1,00
MEET	20	2,58	1,32	0,75	5,50	20	2,36	1,93	1,00	8,50
TENURE	20	0,39	0,31	0,00	1,00	20	0,604	0,34	0,00	1,00
LEV	20	0,72	0,98	0,02	4,05	20	0,55	0,86	0,02	3,67
MOWNER	20	0,013	0,04	0,00	0,19	20	0,0014	0,004	0,00	0,02
SIZE	20	28,58	1,48	26,02	31,09	20	28,68	1,5	26,03	31,02
GROWTH	20	1,28	5,56	-0,97	24,84	20	0,29	0,28	-0,09	0,98

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Tabel 3
Hasil Regresi Logistik

Variabel	Prediksi Arah	Nomor Hipotesis	Koefisien	Signifikansi
INDP	-	1	-79,318	0,999
FINEXP	-	2	-8,859	0,024**
MEET	-	3	-0,037	0,904
TENURE	-	4	-10,229	0,007*
MOWNER	-	5	691,214	0,010**
LEV	+	6	-0,521	0,568
SIZE	+	7	1,283	0,056***

Variabel	Prediksi Arah	Nomor Hipotesis	Koefisien	Signifikansi
GROWTH	+	8	-5,312	0,012**
AUDIT	-	Variabel Kontrol	-7,372	0,008*

* Signifikan pada 0,01
** Signifikan pada 0,05
*** Signifikan pada 0,1

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis pertama menyatakan bahwa jumlah komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama **tidak diterima** karena tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa jumlah komite audit independen tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah anggota komite audit independen yang semakin banyak tidak secara efektif mengurangi kecurangan pelaporan keuangan perusahaan *listed* di Bursa Efek Indonesia. Pembentukan komite audit independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja.

Argumen yang dapat mendukung hal tersebut karena di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” bahwa bagi perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekurang-kurangnya membentuk komite audit yang anggotanya satu orang komisaris independen dan dua orang lainnya dari berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang *listed* anggota-anggota komite auditnya harus orang yang independen. Oleh karena itu, jumlah komite audit yang independen tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, sehingga variabel komite audit independen tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Menon dan Williams (1994) yang menyatakan juga bahwa kemungkinan memiliki komite audit yang independen seluruhnya adalah tidak berhubungan dengan beragam proksi untuk tuntutan bagi sertifikasi akuntansi.

Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua **diterima**. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ketika semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang dapat mendukung hal tersebut adalah ketika komite audit memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi maka komite audit akan melakukan tugas pengawasannya secara efektif yaitu pengawasan proses pelaporan keuangan, sehingga dengan pengawasan yang efektif tersebut akan memperkecil kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan yang akan dilakukan oleh manajemen. Sejalan dengan teori agensi bahwa pendelegasian tanggung jawab pemegang saham untuk pengendalian internal kepada dewan komisaris kemudian didelegasikan kepada komite audit untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, sehingga komite audit yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan

serta akuntansi dapat melakukan proses pengawasan pelaporan keuangan dengan efektif. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Raghunandan *et al.* (2001) yang menemukan bahwa komite terdiri dari setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi lebih cenderung untuk (1) mengadakan pertemuan lebih lama dengan kepala auditor internal, (2) menyediakan akses pribadi untuk kepala auditor internal; dan (3) memeriksa proposal audit internal dan hasil-hasil audit internal.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis ketiga menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga **tidak diterima** karena tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa jumlah rapat komite audit tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Ketika jumlah rapat komite audit semakin banyak maka tidak secara efektif dalam mengurangi kecurangan pelaporan keuangan karena hasil rapat dari komite audit disampaikan kepada dewan komisaris, sehingga tergantung dari dewan komisaris melakukan tindak lanjut atas saran komite audit atau tidak. Pada akhirnya, ketika

rapat komite audit banyak tetapi tidak ada tindak lanjut dari dewan komisaris maka rapat komite audit tidak akan efektif dalam mengurangi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Penjelasan lain yang dapat digunakan untuk menerangkan hal tersebut adalah pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut menyebabkan komite audit belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan perannya tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa pertemuan komite audit jarang dihadiri baik oleh pihak manajemen maupun oleh auditor eksternal. Sehingga, masalah-masalah yang terdapat dalam proses laporan keuangan tidak terungkap sehingga tidak diketahui oleh komite audit. Hal tersebut menyebabkan masalah yang ada dalam proses pelaporan keuangan tidak menemukan penyelesaian (Pamudji dan Trihartati, 2008). Hasil penelitian ini mendukung juga penemuan Mustafa dan Meier (2006) yang menyatakan bahwa rapat komite audit tidak signifikan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan aset yang merupakan salah satu bentuk kecurangan selain kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis keempat menyatakan bahwa masa jabatan komite audit

berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat **diterima**. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ketika semakin lama masa jabatan anggota komite audit maka secara efektif akan mengurangi terjadinya tindak kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang mendukung pernyataan tersebut adalah masa jabatan komite audit yang melakukan pengawasan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut karena dengan masa jabatan komite audit yang lebih lama, maka komite audit akan lebih memahami seluk beluk perusahaan serta mengenal karakteristik para manajer yang diawasi oleh komite audit sehingga komite audit yang masa jabatannya lebih lama tidak akan mudah dikelabui oleh manajer. Hasil penelitian tersebut mendukung juga penelitian dari Beasley (1996) menemukan bahwa rata-rata masa jabatan direksi dari luar secara signifikan lebih kecil pada perusahaan curang dibandingkan dalam perusahaan yang tidak curang.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis kelima menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kemungkinan

kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kelima **signifikan**, tetapi hipotesis **tidak diterima** karena arah antara yang diprediksi dalam hipotesis dengan hasil penelitian berbeda arah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ketika kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris semakin sedikit atau semakin kecil, maka akan secara efektif mengurangi tindak kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang mendukung adalah ketika kepemilikan manajerial semakin besar maka kemungkinan manajemen untuk memenuhi keinginan prinsipal yang juga adalah dirinya sendiri semakin besar pula (Sukartha, 2007). Pemenuhan keinginan prinsipal tersebut dapat dilakukan oleh manajemen dengan melakukan kecurangan pelaporan keuangan yang mana manajemen dalam hal ini juga sebagai agen. Selain itu, ketika eksekutif memiliki kepentingan keuangan yang signifikan dalam perusahaan, situasi keuangan pribadi mereka akan mengancam kinerja keuangan perusahaan (Beasley, 1996). Oleh karena itu, arah yang dihasilkan pada penelitian ini menghasilkan arah positif. Hasil penelitian ini tidak mendukung penemuan yang telah diungkapkan Deli dan Gillan (2000), sejauh mana bahwa kepemilikan manajerial menyelaraskan

insentif manajemen dengan pemegang saham, sehingga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan akan berhubungan negatif dengan kepemilikan manajerial.

Pengaruh *Leverage* Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis keenam menyatakan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keenam **tidak diterima** karena tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rasio *leverage* perusahaan yang rendah tidak akan efektif mengurangi terjadinya tindakan kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang mendukung bahwa *leverage* tidak mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan mungkin disebabkan oleh pengawasan dari *debtholder* tidak cukup efektif. Hal ini menyebabkan keberadaan *leverage* dalam perusahaan tidak secara efektif mampu menurunkan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penemuan Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis ketujuh menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketujuh **diterima**. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ketika semakin kecil aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka secara efektif dapat mengurangi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang mendukung adalah dalam teori akuntansi positif oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan diprosikan untuk besarnya biaya politik sebuah perusahaan. Perusahaan besar dalam hal ini berusaha untuk mengecilkan labanya agar tidak ada regulasi atau pajak baru yang akan ditetapkan bagi mereka. Mengecilkan laba ini dilakukan dengan cara menanggukkan laba periode sekarang ke periode mendatang. Mengecilkan laba tersebut bisa juga dilakukan dengan kecurangan laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga dilihat dari kompleksitas transaksi dalam perusahaan. Ketika dalam perusahaan besar transaksinya semakin kompleks, maka kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga

semakin memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Fama dan Jensen (1983a,b) menunjukkan bahwa biaya agensi cenderung untuk meningkat dengan ukuran perusahaan. Peningkatan biaya agensi menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk mengawasi dan mekanisme pengendalian lainnya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian ini juga akan meningkatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen, dalam hal ini konflik antara perusahaan (agen) dan pemerintah (prinsipal).

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pernyataan hipotesis kedelapan menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedelapan **signifikan**, tetapi hipotesis **tidak diterima** karena arah antara yang diprediksi dalam hipotesis dengan hasil penelitian berbeda arah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat akan secara efektif mengurangi tindakan kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Argumen yang mendukung adalah hasil penelitian dari Loebbecke *et al.* (1989) Bell *et al.* (1991) menunjukkan bahwa

dalam kasus dimana perusahaan mengalami pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata industri, manajemen akan memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan (Skousen *et al.*, 2009). Oleh karena itu, arah yang dihasilkan menjadi negatif yang berkebalikan dengan prediksi arah pada hipotesis yang memprediksikan arah positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena pembentukan komite audit independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja, dimana di Indonesia diatur dalam Peraturan No. IX.I.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”.
2. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman keuangan serta akuntansi akan lebih menguasai bidang pekerjaannya, sehingga diharapkan akan melakukan proses pengawasan pelaporan keuangan dengan efektif.
3. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika laporan atau masukan dari komite audit tidak ada tindak lanjut dari dewan komisaris, maka berapapun jumlah rapat komite audit tidak akan memberikan pengaruh terhadap penurunan kecurangan pelaporan keuangan.
4. Masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena anggota komite audit yang masa jabatan lebih lama, maka komite audit tersebut akan lebih memahami seluk beluk perusahaan serta mengenal karakteristik para manajer/dirensi yang mereka awasi.
5. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika kepemilikan manajerial semakin besar maka kemungkinan manajemen untuk memenuhi keinginan prinsipal yang juga adalah dirinya sendiri semakin besar pula (Sukartha, 2007)
6. *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena mungkin disebabkan oleh pengawasan dari *debtholder* tidak cukup efektif.
7. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena menurut teori akuntansi positif

oleh Watts dan Zimmerman (1986) bahwa perusahaan besar berusaha untuk mengecilkan labanya guna menghindari regulasi atau pajak baru yang ditetapkan terhadap mereka. Selain itu juga perusahaan besar memiliki transaksi yang semakin kompleks, sehingga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan juga dimungkinkan akan meningkat.

8. Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang berada dibawah rata-rata industri, manajemen akan memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan (Skousen *et al.*, 2009).

Implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan bagi regulator untuk merevisi kembali peraturan yang mengatur tentang pedoman dan pembentukan pelaksanaan kerja komite audit bagi perusahaan *listed*. Terutama dalam hal masa jabatan komite audit dan jumlah komite audit yang memiliki keahlian keuangan serta akuntansi.
2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penetapan kebijakan dalam perusahaan yaitu tentang penentuan program bonus berupa saham bagi direksi. Selain itu juga terhadap mekanisme

pengendalian dan pengawasan ketika kondisi perusahaan asetnya besar dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang rendah.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,764, sehingga variabel-variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 76,4% sedangkan sisanya sebesar 23,6% dapat dijelaskan variabel-variabel diluar model dengan menambahkan variabel opini audit untuk menguji pengaruhnya terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Ketika perusahaan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan bisa dicegah atau diminimalisir.
2. Menggunakan pengukuran kecurangan pelaporan keuangan dengan ukuran lain yang tidak mengandalkan database dari suatu instansi saja. Pengukuran kecurangan bisa dilakukan dengan cara memproksikannya dengan manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L.J., dan S. Parker.2000.Audit Committee Characteristics dan Auditor Choice.*Auditing :A Journal of Practice and Theory* 19(2):47-66

- Abbott, L.J., Y. Park, dan S. Parker. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance* 26(11):55-67.
- Abbott, L.J., Susan Parker, Gary F Peters, dan K Raghunandan. 2003. The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 22, 2; hal. 17.
- Abbott, L.J., S. Parker, dan G. Peters. 2004. Audit Committee Characteristics and Restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 23(1):69-87.
- Ajzen, Icek. 1985. "Dari Niat Untuk Tindakan: Sebuah Teori Perilaku Terencana", <http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.html>. Diakses tanggal 31 Desember 2009
- Beasley, M.S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71(4):443-465.
- Beasley, M.S., J.V. Carcello dan D.R. Hermanson. 1999. *Fraudulent Financial Reporting 1987-1997 : An Analysis of US Public Companies*. Jersey City, NJ :Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO).
- Beasley, M.S., J.V. Carcello, D.R. Hermanson, dan P.D Lapedes. 2000. Fraudulent Financial Reporting :Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanism. *Accounting Horizons* 14(4):441-454.
- Bedard, J., S. Chtourou, L. Courteau. 2004. The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 23(2):13-35.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees*. Stamford, CT: BRC.
- Collier, P. A. 1993. Audit committees in Major UK Companies. *Managerial Auditing Journal* 8 (3):25-30.
- Deli, D., dan S. Gillan. 2000. On The Demand for Independent and Active Audit Committees. *Journal of Corporate Finance* 6(4):427-445.
- Fama, E. F., dan M. C. Jensen. 1983a. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law and Economics* 26: 327-349.
- Fama, E. F., dan M. C. Jensen. 1983b. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics* 26: 301-325.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huang, Hua-Wei, dan Sheela Thiruvadi. 2010. Audit Committee Characteristics and Corporate Fraud. *International Journal of Public Information Systems*. hal 71-82.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. 2012. "Komite Audit". <http://www.komiteaudit.org>, diakses 17 Juni 2012.
- Jackson, L.A Owens, D. Robinson dan S.W Shelton. 2009. The Association Audit Committee Characteristics, The Contracting Process and Fraudulent Financial Reporting. *American Journal & Business* Vol. 24 No.1.

- Januarti, Indira.2004.Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif.*Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 01 No.01.
- Jensen, M. C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3:305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance.2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta.
- Menon,K., dan J.Williams.1994.The Use of Audit Committees for Monitoring. *Journal of Accounting and Public Policy* 13:121-139.
- Nurharyanto.2011. *Memahami Fraud dan Melaksanakan Investigative Audit Pada Perusahaan /Korporasi (Teori dan Aplikasinya)*.Lembaga Pengembangan Fraud Auditing.
- New York Stock Exchange (NYSE).2002. *Corporate Governance Rule Proposals Reflecting Recommendations from the NYSE Corporate Accountability and Listing Standards Committee As Approved by the NYSE Board of Directors*.
- Pamudji, S. dan Aprillya Trihartati.2008. Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi dan Auditng Universitas Diponegoro*.vol 6 no.1
- Qin, Li dan Tan Liwen.2007.An Empirical Analysis of The Relation Between Board Independence and Earnings Management. Wuhan University. *Science Innovation Academic Frontier* hal 327-331.China
- Skousen, C., Smith, K. R., Wright, C. J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *Emerald Group Publishing Limited: Advances in Financial Economics* vol. 13, hal. 53-81
- Sukartha, Made.2007.Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi.*Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 10 hal:243-267.
- U.S. Congress. 2002. Sarbanes-Oxley Act of 2002, H.R. 3763.
- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 2002. Speech by SEC Staff: Making Audit Committees More Effective. Tulane Corporate Law Institute.New Orleans.<http://tw.search.yahoo.com/search?fr=yfp&ei=UTF-8&p=speech+audit+committee>.
- Watts,R. dan J. Zimmerman.1986.*Positive Accounting Theory*.Englewood Cliffs,Nj:Prentice Hall,Inc.
- Watts, R dan J.Zimmerman.1990.Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective.*The Accounting Review* vol.65 no.1 hal :131-156.